

**ANALISIS PENGARUH KREDIT USAHA
MIKRO, KREDIT USAHA KECIL, DERAJAT
PENDIDIKAN, DAN DERAJAT KESEHATAN
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN (KASUS :
35 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN 2008-2012)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

TAUFIQ CATUR PRIAMBODO
NIM. 12020110141044

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Taufiq Catur Priambodo

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110141044

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi Studi
Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KREDIT USAHA
MIKRO, KREDIT USAHA KECIL,
DERAJAT PENDIDIKAN, DAN DERAJAT
KESEHATAN TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN (KASUS : 35
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN 2008-2012)**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS

Semarang, 16 Desember 2014

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS)

NIP. 195810081986031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Taufiq Catur Priambodo
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110141044
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi Studi
Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KREDIT USAHA MIKRO, KREDIT USAHA KECIL, DERAJAT PENDIDIKAN, DAN DERAJAT KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN (KASUS : 35 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2008-2012)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 Desember 2014

Tim Penguji

1. Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS (.....)
2. Prof. Dr. H. Purbayu Budi Satonsa, MS (.....)
3. Achma Hendra Setiawan, SE., M.Si. (.....)

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

Anis Chariri, SE., M.com. Ph.D. Akt
NIP 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Taufiq Catur Priambodo, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Analisis Pengaruh Kredit Usaha Mikro, Kredit Usaha Kecil, Derajat Pendidikan, dan Derajat Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan (Kasus: 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008-2012)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 16 Desember 2014
Yang membuat pernyataan,

(Taufiq Catur Priambodo)
NIM : 12020110141044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

” Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan.”
(QS. As Sajdah: 17)

“Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (at-Tin : 4), dengan kewajiban untuk beribadah kehadiratNya (al-Qur'an 51 :56), sebagai khalifah (adzDzariyat : 30), dengan tugas melestarikan kehidupan dan memakmurkan alam (Al-Anbiya' : 107)

“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia tetapi hanya kamu sendiri yang menangis dan pada kematianmu semua orang menangis sedih tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”
(Mahatma Gandhi)

” Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri, dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu.”
(HR.Ath Thabrani)

Karya ini ananda persembahkan untuk :

Rabb ku..., Allahku..., Sang Maha Raja, yang menjadi tumpuan segenap doa, yang dengan-Nya selalu ada harapan, yang bersama-Nya tak pernah ada jalan buntu.

Mamah (Almarhumah), Papa, Mas Indra, Mbak Dona, Dik Arjuna, Mas Rio (Almarhum), Mas Aditya, Mbak Isnaini, Adinda Dita, dan keluarga tercinta untuk setiap doa, dukungan, cinta, dan kasih sayang yang senantiasa mengiringi langkahku.

Sahabat dan teman-temanku tersayang atas segala cinta, kasih, dukungan, dan semangat. Semoga karya ini menjadi kado cinta yang indah bagi kalian semua...

ABSTRACT

Poverty alleviation efforts have been done by the government through the direct attempts such as the provision of credit, better improvement in education and health services. However, the evidence of these efforts being successful still requires empirical testing. The aim of this study is to examine the effect of micro business credit, small business credit, education level, and health status against poverty

The method used in this study is panel data with Fixed Effect Model and regional dummy. The use of region dummy in this research is to see the variations of poverty conditions in 35 districts / cities in Central Java between 2008 to 2012. The data were obtained from BPS reports and the reports of Bank Indonesia during the year 2008-2012 for each district / city in Central Java.

The results of research found that micro business credit have a positive effect and statistically significant ($\alpha = 5\%$) against poverty, small business credit are negative and statistically significant ($\alpha = 5\%$) against poverty, education is also negative and statistically significant ($\alpha = 5\%$) against poverty, while health is not statistically significant.

Keywords: business credit, education, health, poverty

ABSTRAK

Upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah melalui bentuk langsung seperti pemberian kredit, peningkatan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang semakin baik. Namun demikian bukti keberhasilan upaya tersebut masih memerlukan pengujian empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kredit usaha mikro, kredit usaha kecil, derajat pendidikan, dan derajat kesehatan terhadap kemiskinan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*) dan dummy wilayah. Penggunaan dummy wilayah dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat variasi kondisi kemiskinan 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah selama periode tahun 2008 hingga 2012. Data penelitian diperoleh dari laporan BPS dan laporan Bank Indonesia selama tahun 2008 – 2012 untuk masing-masing kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Hasil penelitian mendapatkan bahwa kredit usaha mikro justru berpengaruh positif dan signifikan secara statistik ($\alpha=5\%$) terhadap kemiskinan, kredit usaha kecil berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik ($\alpha=5\%$) terhadap kemiskinan, pendidikan juga berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik ($\alpha=5\%$) terhadap kemiskinan, sedangkan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Kata kunci : kredit usaha, pendidikan, kesehatan, kemiskinan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata atau S1 pada jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Kredit Usaha Mikro, Kredit Usaha Kecil, Derajat Pendidikan, dan Derajat Kesehatan terhadap Kemiskinan (Kasus: 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008-2012), tak lepas dari doa dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibunda (Almarhumah) dan Ayahanda terimakasih telah memberikan kasih sayang, arahan serta doa-doa yang tiada henti bagi penulis, serta kakak-kakak saya Indra Yudistira Pratama, Satrio Dwi Wicaksono (Almarhum), Aditya Tri Anggoro, yang telah membuat hidup penulis lebih berwarna. Terimakasih juga untuk mbak Dona Fitrianingrum, mbak Isnaini Putri, Aditya Diah Ayu Harwinda, dan dek Arjuna Zhafran Khairy Pratama yang membuat penulis menjadi semangat.
2. Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Hastarini Dwi Atmati, S.E., M.Si. selaku dosen wali yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi selama penulis

menjalani pendidikan di jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

4. Seluruh dosen yang telah membagikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Prof. Dr. FX. Sugiyanto, MS., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman satu angkatan IESP 2010, terima kasih atas kebersamaan selama ini yang kita lalui selama duduk dibangku perkuliahan.
7. Agus Winarendra terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dalam mempelajari ekonometrika.
8. Teman-teman sebimbingan Aris, Kunto, mbak Tias, dan mas Ilham yang telah menjadi inspirasi dan semangat untuk saya dalam mengerjakan skripsi.
9. Teman-teman KKN Desa Candimulyo terima kasih atas kenangan selama menginap di Posko Desa Candimulyo.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.

Semarang, 16 Desember 2014

Penulis

(Taufiq Catur Priambodo)

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Kelulusan Ujian	iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
<i>Abstract</i>	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan penelitian	11
1.3.2 Kegunaan penelitian	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Definisi, Jenis, Batasan, dan Penyebab Kemiskinan	15
2.1.1.1 Definisi Kemiskinan	15
2.1.1.2 Jenis-Jenis dan Batasan Kemiskinan	18
2.1.1.3 Penyebab Kemiskinan	24
2.1.2 Kredit.....	31
2.1.2.1 Pengertian Kredit	31
2.1.2.2 Pengaruh Kredit terhadap kemiskinan	33

2.1.3 Pendidikan	34
2.1.3.1 Pengertian Pendidikan.....	34
2.1.3.2 Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan	37
2.1.4 Kesehatan	39
2.1.4.1 Pengertian Kesehatan.....	39
2.1.4.2 Pengaruh Kesehatan Terhadap Kemiskinan	40
2.1.5 Penelitian Terdahulu.....	41
2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	48
2.3 Hipotesis	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	52
3.2 Jenis dan Sumber Data	55
3.3 Metode Pengumpulan Data	56
3.4 Metode Analisis	57
3.4.1 Estimasi Model Regresi Dengan Panel Data.....	61
3.4.2 Estimasi Model Regresi Dengan Penggunaan Variabel Dummy.....	62
3.5 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik.....	65
3.6 Pengujian Statistik	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	72
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	72
4.1.1 Kemiskinan	74
4.1.2 Kredit Usaha Mikro	76
4.1.3 Kredit Usaha Kecil	78
4.1.4 Derajat Pendidikan.....	80
4.1.5 Derajat Kesehatan	82

4.2 Hasil Analisis.....	84
4.2.1 Uji Asumsi Klasik	84
4.2.2 Model Regresi	89
4.2.2.1 Uji Model (Uji F)	91
4.2.2.2 Koefisien determinasi (R^2)	92
4.2.2.3 Pengujian Hipotesis (Uji t).....	92
4.3 Interpretasi Hasil	94
4.3.1 Pengaruh Kredit Usaha Mikro Terhadap Kemiskinan	94
4.3.2 Pengaruh Kredit Usaha Kecil Terhadap Kemiskinan.....	95
4.3.3 Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan.....	96
4.3.4 Pengaruh Kesehatan Terhadap Kemiskinan	98
4.3.5 Variabel <i>Dummy</i>	99
BAB V PENUTUP	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Keterbatasan Penelitian	102
5.3 Implikasi Kebijakan	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2008 – 2012 (persen)	4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Miskin (Kota, Desa, Kota+Desa), Persentase Penduduk Miskin (Kota, Desa, Kota+Desa), di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (persen)	5
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	46
Tabel 4.1	Deskripsi Kemiskinan di Jawa Tengah 2008 – 2012.....	74
Tabel 4.2	Deskripsi Kredit usaha mikro di Jawa Tengah 2008 – 2012	76
Tabel 4.3	Deskripsi Kredit usaha kecil di Jawa Tengah 2008 – 2012.....	78
Tabel 4.4	Deskripsi derajat pendidikan di Jawa Tengah 2008 – 2012	80
Tabel 4.5	Deskripsi derajat kesehatan di Jawa Tengah 2008 – 2012	83
Tabel 4.6	Uji Korelasi antar variabel.....	87
Tabel 4.7	Hasil Uji <i>Breusch-Godfrey</i> (BG) Model Kemiskinan	87
Tabel 4.8	Hasil Uji <i>White</i> Pada Model Kemiskinan	88
Tabel 4.9	Regresi LSDV.....	89
Tabel 4.10	Uji Model.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tingkat Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan di Indonesia tahun 2008 – 2012 (persen)	2
Gambar 1.2	Posisi Tingkat Kredit Usaha Mikro dan Kecil yang Diberikan Bank Umum dan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (persen)	6
Gambar 1.3	Posisi Tingkat Tamatan Pendidikan 10 tahun ke Atas dan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (persen).....	8
Gambar 1.4	Posisi Angka Kematian Bayi dan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (persen)	9
Gambar 2.1	Lingkaran Setan Kemiskinan Vesri Nurkse.....	27
Gambar 2.2	Empat Dimensi Penyebab Kemiskinan, Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999)	28
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran	49
Gambar 4.1	35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.....	72
Gambar 4.2	Uji Normalitas Jarque Bera.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Data Mentah Kemiskinan, Kredit Usaha Mikro, Kredit Usaha Kecil, Derajat Pendidikan, dan Derajat Kesehatan di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012.....	109
Lampiran B	Hasil Regresi Utama Model Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2008-2012	115
Lampiran C	Hasil Uji Asumsi Klasik Model Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2008-2012.....	118

BAB I

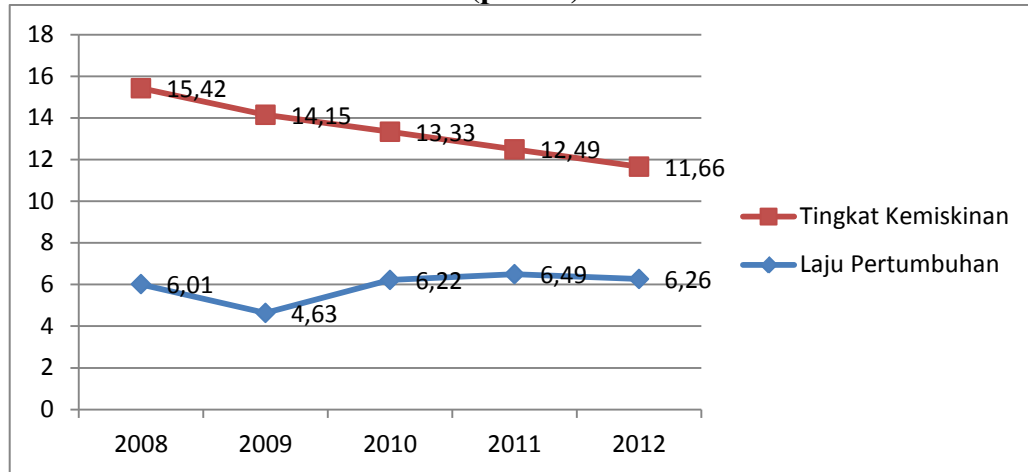
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi pembangunan di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini ditunjukkan dengan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang melansir perekonomian Indonesia pada triwulan ketiga 2013 tumbuh sebesar 5,62 persen dibanding periode sama 2012. Sementara itu, dibanding triwulan kedua 2013, PDB tumbuh 2,96 persen (www.kompas.com, 6 Nopember 2013). Secara keseluruhan tahun 2012, ekonomi dunia tumbuh sebesar 3,2 persen, dimana negara-negara berkembang tumbuh sebesar 5,2 persen sementara negara maju hanya tumbuh sebesar 1,2 persen (Bappenas, 2013). Namun demikian beberapa pihak menilai bahwa di Indonesia masih memiliki masalah kemiskinan yang masih cukup tinggi, meskipun memang ada tren penurunan.

Kemajuan pembangunan suatu negara biasanya diukur dengan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonominya yang baik secara keseluruhan maupun secara perkapita. Menurut Todaro dan Smith (2006), indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan adalah tingkat pendapatan perkapita (*income per capita*) atau GNI per kapita. Pola perubahan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia selama tahun 2008 – 2012 diperoleh sebagai berikut:

Gambar 1.1
Tingkat Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan di Indonesia tahun 2008–2012
(persen)



Sumber: BPS, Statistik Indonesia

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2008–2012. Pada periode tahun 2008 laju pertumbuhan sebesar 6,01 persen turun menjadi 4,63 persen pada tahun 2009. Pada tahun 2010 naik menjadi 6,22 persen dan pada tahun 2011 naik lagi menjadi 6,49 persen. Terjadi penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2012 yaitu sebesar 6,26 persen. Sebaliknya tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami kecenderungan yang menurun. Pada periode tahun 2008 sampai 2012 tingkat kemiskinan turun dari sebesar 15,42 persen pada tahun 2008 menjadi 11,66 persen pada tahun 2012.

Namun tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi karena berada pada kisaran di atas 10% dalam kurun tahun 2008–2012. Pada tahun 2012 misalnya, dengan angka kemiskinan sebesar 11,66% pada tahun 2012 berarti bahwa setidaknya 28,59 juta jiwa penduduk di Indonesia yang berada pada

kategori miskin. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu mengangkat taraf hidup banyak masyarakat. Dengan kata lain pemerataan pembangunan belum maksimal. Hal ini tentunya masih menjadikan permasalahan yang dihadapi pemerintah mengenai kemiskinan dan upaya untuk terus menurunkannya masih terus dilakukan.

Bank Dunia dalam salah satu publikasi *World Development Report* yang terbit pada tahun 1991 bahwa tantangan utama pembangunan di negara-negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi adalah upaya memperbaiki kualitas kehidupan. Sebaliknya kualitas hidup yang lebih baik mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi. Namun demikian kualitas hidup yang baik tidak hanya membutuhkan pendapatan yang tinggi, namun ada hal lain yang harus diperjuangkan seperti memperbaiki kualitas pendidikan, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individual, dan pelestarian ragam kehidupan budaya (Todaro dan Smith, 2006).

Pada bulan September 2000, PBB menyetujui delapan butir Millenium Development Goals (MDGs), yaitu komitmen untuk mencapai kemajuan yang nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan manusia lainnya pada tahun 2015. MDGs adalah pernyataan terkuat dari komitmen dunia internasional untuk memberantas kemiskinan global (Todaro dan Smith, 2006). Terkait dengan target tujuan pembangunan millenium yang harus tercapai pada tahun 2015, maka Pemerintah masih harus bekerja keras untuk dapat

mencapai target tersebut, mengingat upaya penanggulangan kemiskinan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan.

Salah satu provinsi yaitu Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif besar. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki variasi penduduk yang cukup besar berdasarkan letak pemukimannya.

Tabel 1.1
Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Provinsi Di Pulau Jawa
Tahun 2008–2012 (persen)

Provinsi	Tingkat Kemiskinan					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011	2012	
DKI Jakarta	4.29	3.62	3.48	3.75	3.7	3.77
Jawa Barat	13.01	11.96	11.27	10.65	9.89	11.36
Jawa Tengah	19.23	17.72	16.56	15.76	14.98	16.85
DI Yogyakarta	18.32	17.23	16.83	16.08	15.88	16.87
Jawa Timur	18.51	16.68	15.26	14.23	13.08	15.55
Banten	8.15	7.64	7.16	6.32	5.71	7.00

Sumber: BPS, Statistik Indonesia

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan tingkat kemiskinan Provinsi-Provinsi di pulau Jawa selama kurun waktu 2008 sampai 2012. Jika di lihat dari rata-rata tingkat kemiskinan, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi kedua setelah Provinsi DI Yogyakarta dengan perolehan rata-rata angka kemiskinan sebesar 16,85 persen.

Menurut Todaro dan Smith (2006), pada umumnya penduduk miskin tinggal di daerah–daerah pedesaan, dengan bermata pencaharian pokok di bidang–bidang pertanian dan kegiatan–kegiatan yang berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional. Kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak – anak, dan

mereka berada di antara kelompok etnis minoritas dan penduduk pribumi. Dua pertiga penduduk miskin di negara berkembang masih menggantungkan hidup mereka pada pola pertanian yang subsisten, baik sebagai petani kecil atau buruh tani yang berpenghasilan rendah.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin (Kota, Desa, Kota+Desa),
Persentase Penduduk Miskin (Kota, Desa, Kota+Desa),
di Jawa Tengah Tahun 2008–2012 (persen)

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000) KOTA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000) DESA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000) KOTA+DESA	% PENDUDUK MISKIN KOTA	% PENDUDUK MISKIN DESA	%PENDUDUK MISKIN KOTA + DESA
2008	2556,50	3633,10	6189,60	16,34	21,96	19,23
2009	2420,90	3304,80	5725,70	15,41	19,89	17,72
2010	2258,90	3110,20	5369,20	14,33	18,66	16,56
2011	2092,51	3014,85	5107,36	14,12	17,14	15,76
2012	1946,50	2916,90	4863,40	13,11	16,55	14,98

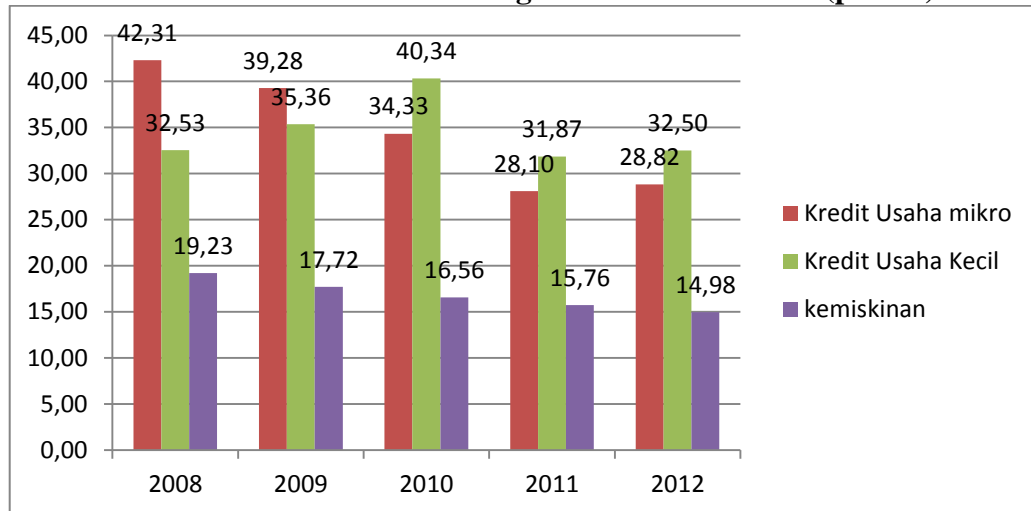
Sumber: BPS, Statistik Indonesia

Berdasarkan pada Tabel 1.1 jumlah penduduk miskin kota, jumlah penduduk miskin desa, jumlah penduduk miskin kota dan desa, persentase penduduk miskin kota, persentase penduduk miskin desa, persentase penduduk miskin kota dan desa di Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah khususnya di daerah pedesaan menjadikan upaya pengentasannya tak lepas dari banyaknya penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan. Masalah akses ekonomi dan fasilitas penunjang nampaknya dapat disinyalir menjadi faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang tinggi di pedesaan.

Menurut Supriyanto (2006), pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu cara yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Namun ketika pinjaman diberikan kepada mereka yang sangat miskin, kemungkinan besar pinjaman tersebut tidak akan pernah kembali. Hal ini mengingat karena mereka (*the extreme poor*) tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Sedangkan sebagian masyarakat lain yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) atau masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*), mereka memiliki penghasilan, meskipun tidak banyak.

Bank Indonesia (dalam Bayu Nuswantara, 2012), menyatakan bahwa masih rendahnya tingkat pinjaman usaha mikro dan kecil kepada lembaga keuangan formal disebabkan beberapa permasalahan antara lain: (1) kurangnya aksesibilitas usaha mikro dan kecil kepada lembaga keuangan formal terutama informasi dan persyaratan kredit, (2) tidak adanya anggunan kredit, (3) kurangnya manajemen keuangan, (4) rendahnya kualitas sumber daya manusia, (5) terbatasnya kompetensi kewirausahaan dan permodalan.

Gambar 1.2
Posisi Tingkat Kredit Usaha Mikro dan Kecil yang Diberikan Bank Umum dan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2008–2012 (persen)



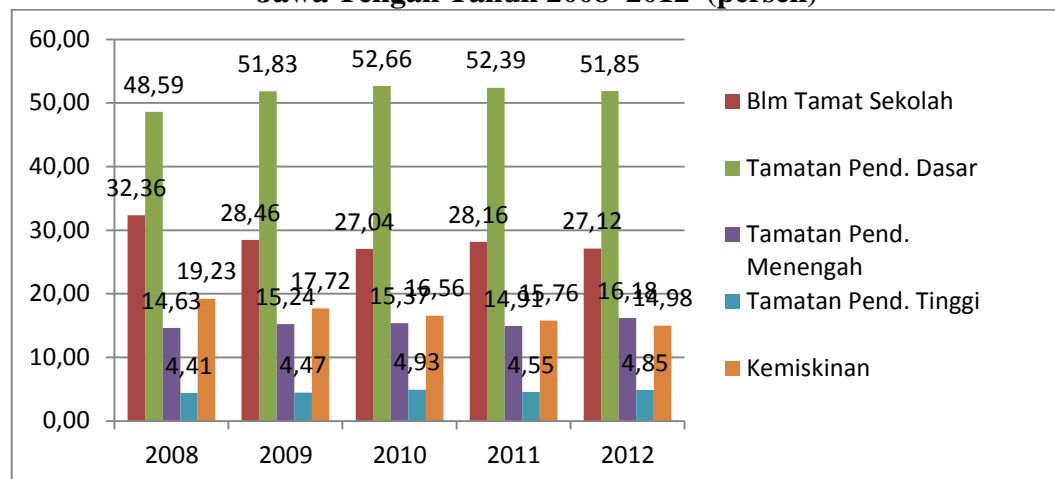
Sumber: Statistik Keuangan Ekonomi Daerah Jawa Tengah, Januari 2011 dan Febuari 2013, diolah

Gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa persentase posisi kredit mikro dari tahun 2008 sampai tahun 2012 cenderung mengalami penurunan dari 42,31 persen di tahun 2008 menjadi 28,82 persen pada tahun 2012. Sebaliknya posisi kredit kecil memiliki kecenderungan terjadi kenaikan dari tahun 2008 sampai tahun 2012 yaitu dari 32,53 persen pada tahun 2008 menjadi 40,34 persen pada tahun 2010 dan pada tahun 2012 menjadi 32,50 persen. Jika dikaitkan dengan angka kemiskinan, ada indikasi bahwa penurunan kemiskinan dapat berkurang seiring dengan meningkatnya posisi kredit kecil yang diberikan. Namun penurunan kemiskinan justru seiring dengan penurunan posisi kredit mikro yang diberikan.

Todaro dan Smith (2006), penyediaan fasilitas pendidikan dasar merupakan prioritas utama bagi semua negara-negara berkembang. Di sebagian besar negara berkembang anggaran pengeluaran pemerintah dialokasikan ke

sektor pendidikan. Arius Jonaidi (2012) menyatakan bahwa rendahnya produktivitas tenaga kerja kaum miskin dapat disebabkan oleh karena rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, sehingga mereka dapat keluar dari jeratan kemiskinan.

Gambar 1.3
Posisi Tingkat Tamatan Pendidikan 10 tahun ke Atas dan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2008–2012 (persen)

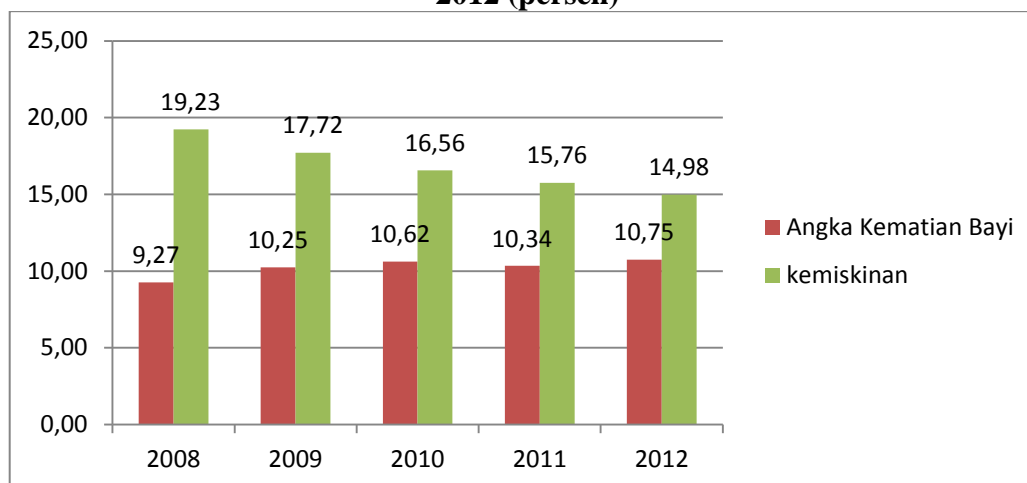


Sumber: Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas 2008–2012, diolah

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa bagian terbesar penduduk di Jawa Tengah masih berpendidikan dasar. Pola perubahan yang terjadi selama tahun 2008 hingga 2012 menunjukkan bahwa arah yang berlawanan dengan pola penurunan tingkat kemiskinan adalah berkaitan dengan tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Indikasi akan adanya penurunan kemiskinan nampaknya juga dapat dikaitkan dengan kenaikan penduduk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2006) bahwa kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan. Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut Chriswardani Suryawati (2005), tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan rendahnya kesempatan memperoleh berbagai fasilitas kesejahteraan sosial akan mempersulit terpenuhinya berbagai keperluan pangan bergizi atau kemampuan untuk menangkis penyakit yang pada akhirnya mengakibatkan tingkat kematian bayi masih cenderung tinggi.

Gambar 1.4
Posisi Angka Kematian Bayi dan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 (persen)



Sumber: Profil Kesehatan Kab/Kota 2008 – 2012

Pola perubahan angka kematian bayi menunjukkan adanya tren kenaikan selama tahun 2008–2012. Hal ini nampaknya menjadi hal yang kontradiksi dengan tren penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi, karena peningkatan angka

kematian bayi mencerminkan kekurangberhasilan penyelenggaraan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Gambaran pola perubahan yang terjadi di Jawa Tengah yang berkaitan dengan jumlah kredit mikro dan kecil yang dikeluarkan oleh bank umum, tingkat pendidikan penduduk dan angka kematian bayi yang terjadi masalah memberikan ketidaksesuaian dengan beberapa kajian teoritis mengenai faktor kemiskinan. Penelitian dengan menggunakan data panel digunakan untuk melihat secara lebih lengkap mengenai pengaruh alokasi kredit mikro-kecil, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan. Sehingga judul penelitian ini adalah **"Analisis Pengaruh Kredit Usaha Mikro, Kredit Usaha Kecil, Derajat Pendidikan, dan Derajat Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan (Kasus : 35 Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah Tahun 2008-2012)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu tolok ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak sekali masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya kemiskinan. Dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk yang termasuk tergolong dalam penduduk miskin

Pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 terlihat bahwa provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata kemiskinan yang cukup tinggi dan jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah lebih banyak di dominasi di pedesaan. Jumlah penduduk

miskin di pedesaan masih cenderung tinggi disebabkan karena kualitas sumber daya manusia (*human capital*) untuk pendidikan, kesehatan dan kapasitas manusia yang lain untuk meningkatkan produktivitas masih cenderung rendah. Selain kualitas sumber daya manusia, aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan modal untuk meningkatkan produktivitas juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Atas dasar permasalahan di atas maka persoalan penelitian yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kredit usaha mikro terhadap tingkat kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2008–2012 ?
2. Bagaimana pengaruh kredit usaha kecil terhadap tingkat kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2008–2012 ?
3. Bagaimana pengaruh derajat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2008–2012 ?
4. Bagaimana pengaruh derajat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2008–2012 ?
5. Bagaimana pengaruh kredit usaha mikro, kredit usaha kecil, derajat pendidikan, dan derajat kesehatan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Kab/Kota Jawa Tengah tahun 2008–2012 ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh kredit usaha mikro terhadap tingkat kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2008–2012.
2. Menganalisis pengaruh kredit usaha kecil terhadap tingkat kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2008–2012.
3. Menganalisis pengaruh derajat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2008–2012.
4. Menganalisis pengaruh derajat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2008–2012.
5. Menganalisis pengaruh kredit usaha mikro, kredit usaha kecil, derajat pendidikan, dan derajat kesehatan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Kab/Kota Jawa Tengah tahun 2008–2012.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penulis maupun pembaca, antara lain:

1. Secara Praktis : Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi para pembaca khususnya mahasiswa dan pengambil kebijakan yang berguna dalam memahami pengaruh kredit usaha mikro, kredit usaha kecil, derajat pendidikan, dan derajat kesehatan, yang mempengaruhi tingkat kemiskinan

sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan.

2. Secara Teoritis : Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang terdiri dari tingkat kemiskinan di Indonesia serta fenomena tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Menyajikan landasan teori kemiskinan, pengaruh kredit terhadap kemiskinan, pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan, pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan. Disamping itu pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini dipaparkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat pula variabel penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini dan definisi operasional mengenai variabel yang akan digunakan. Ada

pula jenis dan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini serta metode analisis apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini dipaparkan tentang deskripsi obyek penelitian, yaitu deskripsi kemiskinan, deskripsi kredit usaha mikro, deskripsi kredit usaha kecil, deskripsi pendidikan, dan deskripsi kesehatan di Jawa Tengah, analisis data dan pembahasan.

Bab V Penutup

Pada bab ini disampaikan kesimpulan dari pembahasan kemudian disertakan saran dan implikasi kebijakan yang diberikan oleh penulis dari hasil penelitian tersebut yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi, Jenis, Batasan, dan Penyebab Kemiskinan

2.1.1.1 Definisi Kemiskinan

Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Badan Pusat Statistik (2013) menjelaskan secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut *kemiskinan relatif* dan *kemiskinan absolut*, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dibutuhkan baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

World Bank (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Ini termasuk berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara, dan kapasitas memadai dan kesempatan untuk hidup yang lebih baik itu.

BAPPENAS (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective.

United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan – pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “tidak adanya partisipasi dalam

pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu indikator kemiskinan (BPS, 2013).

Kemiskinan menurut Mudrajad Kuncoro (2006) adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit (kemiskinan), perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran. Tingkat standar hidup dalam suatu negara bisa diukur dari beberapa indikator antara lain *Gross National Product* (GNP) *per capita*, pertumbuhan relatif nasional dan pendapatan per kapita, distribusi pendapatan nasional, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

BKKBN (Bappenas, 2010) mendefinisikan kemiskinan berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, kelompok yang

dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS) dan KS-I. Kelompok inilah yang kemudian menjadi bagian dari target BKKBN dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang salah satunya adalah melalui penyediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) gratis bagi masyarakat miskin.

2.1.1.2 Jenis-Jenis dan Batasan Kemiskinan

Kemiskinan berdasarkan tingkatan kelompok, terbagi menjadi 3 (Setiawan, 2011):

- a) *Destitute*, merupakan kelompok yang paling miskin atau fakir miskin sehingga memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali, serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
- b) *Poor Group*, merupakan kelompok miskin yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan tetapi secara relatif masih memiliki sumber pendapatan dan memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar.
- c) *Near Poor*, merupakan kelompok hampir miskin, sehingga kelompok ini rentan terhadap berbagai gejala ekonomi dan sosial yang dapat menggeser mereka dari status rentan menjadi miskin bahkan fakir miskin bila tidak terdapat bantuan sosial.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD, 2011) menggolongkan kemiskinan ke dalam 3 derajat yang berbeda :

- a) *Potential Poverty*, yaitu seseorang yang memiliki pendapatan berada sedikit di atas garis kemiskinan, sehingga sedikit guncangan eksternal akan menyebabkan masuk ke dalam situasi kemiskinan yang lebih buruk.
- b) *Transient Poverty*, adalah kemiskinan yang terjadi hanya untuk waktu yang relatif sementara akibat kondisi eksternal tertentu, dan dimungkinkan dapat dengan mudah terbebas dari situasi miskin jika kondisi berubah ke arah yang lebih positif.
- c) *Chronic Poverty*, kemiskinan yang berlangsung secara terus menerus atau lebih bersifat permanen akibat kultur kemiskinan (*fatalisme*) atau tempat tinggal yang tidak menguntungkan serta kebijakan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin atau daerah tertinggal.

Menurut Chriswardani Suryawati (2005), kemiskinan berdasarkan sifatnya di bagi menjadi 2 :

- a) *Natural Poverty*, adalah kemiskinan yang berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b) *Artificial Poverty*, merupakan kemiskinan yang lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Ukuran kemiskinan oleh UNDP (Todaro, 2006) adalah pengukuran kemiskinan melalui indeks kemiskinan manusia (Human Poverty Indeks-HPI). Kemiskinan diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama yaitu : (1) kehidupan (lebih dari 30% penduduk negara kurang berkembang tidak mungkin hidup lebih

dari 40 tahun), (2) pendidikan dasar (diukur oleh presentase penduduk dewasa yang buta huruf), serta (3) keseluruhan ketetapan ekonomi (diukur oleh presentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih ditambah presentase anak-anak di bawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan).

Sedangkan Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US\$1,25 dan \$2 per hari masuk dalam kategori miskin (Word Bank, 2010).

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (*Head Count Index*), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu. Rumus dalam penghitungan garis kemiskinan (BPS, 2013) :

$$GK = GKM + GKBM$$

Keterangan :

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKBM = Garis Kemiskinan Bukan Makanan

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan miskin terbagi menjadi dua kriteria yaitu penduduk sangat miskin dan penduduk miskin. Penduduk sangat miskin adalah penduduk yang berada di bawah 0,8 garis kemiskinan sedangkan penduduk miskin pada kriteria ini adalah penduduk yang berada pada 0,8 garis kemiskinan ke atas tetapi masih di bawah garis kemiskinan. Selain itu untuk penduduk yang berada pada garis kemiskinan sampai dengan 1,2 garis kemiskinan masuk pada kriteria penduduk hampir miskin, sedangkan penduduk yang berada di atas 1,2 garis kemiskinan merupakan penduduk tidak miskin (BPS, 2013).

Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) mendata kemiskinan yang merupakan data mikro penduduk miskin di Indonesia yang hanya dapat disajikan provinsi/kabupaten. Adapun indikator yang digunakan ada sebanyak 14 variabel, yaitu (BPS, 2013):

1. Luas lantai rumah.
2. Jenis lantai rumah.

3. Jenis dinding rumah.
4. Fasilitas buang air besar.
5. Sumber air minum.
6. Penerangan yang digunakan.
7. Bahan bakar yang digunakan.
8. Frekuensi makan dalam sehari.
9. Kebiasaan membeli daging/ayam/susu.
10. Kemampuan membeli pakaian.
11. Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik.
12. Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga.
13. Pendidikan kepala rumah tangga.
14. Kepemilikan asset.

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu (BPS, 2013):

1. *Head Count Index* (HCI-P₀), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan

Kor. Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$$\alpha = 0$$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 1$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P₂*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Sumber data utama yang dipakai adalah data

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$$\alpha = 2$$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

2.1.1.3 Penyebab Kemiskinan

Beberapa definisi dan konsepsi dari kemiskinan itu sendiri memberikan satu kondisi bahwa kemiskinan tak lepas dari pertumbuhan perekonomian mereka dan juga kesetaraan yang sama dalam mengakses ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2006), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut:

- a) Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- b) Pendapatan perkapita negara-negara Dunia Ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
- c) Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata

- d) Mayoritas penduduk di negara-negara Dunia Ketiga harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut.
- e) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara negara Dunia Ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di negara maju.
- f) Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Menurut widodo (dalam Yufi Halimah Sa'diyah dan Fitrie Arianti, 2012)

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang atau sebuah keluarga miskin.

Kondisi kemiskinan disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, yaitu :

- a) Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki.
- b) Rendahnya derajat kesehatan. Keadaan kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa.
- c) Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkungan kemiskinan tersebut.
- d) Kondisi terisolasian. Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga

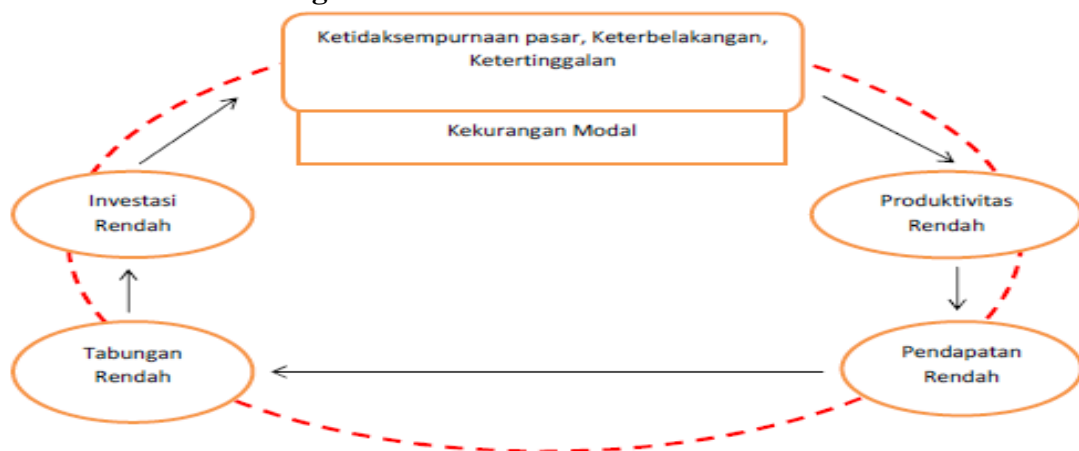
sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Menurut teori Malthus (dalam Todaro dan Smith, 2006) pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara akan menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis. Malthus melukiskan suatu kecenderungan universal bahwa jumlah populasi di suatu negara akan meningkat sangat cepat menurut deret ukur. Sementara itu, karena adanya proses pertambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap, yaitu tanah, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung. Karena pertumbuhan pengadaan pangan tidak dapat berpacu secara memadai atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat agraris, pendapatan perkapita diartikan sebagai produksi pangan perkapita) cenderung terus mengalami penurunan sampai sedemikian rendahnya sehingga segenap populasi harus bertahan pada kondisi sedikit di atas tingkat subsisten.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (dalam Merna Kumalasari dan Dwisetia Poerwono, 2011) penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan. Oleh karena itu, upaya pertama yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf, dan peningkatan keterampilan penduduknya. Kelima hal itu adalah upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sharp, Et. Al (dalam Kuncoro, 2006) mengidentifikasi penyebab kemiskinan penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse dalam Kuncoro (2006), yang mengatakan: *a poor country is poor because it is poor* (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

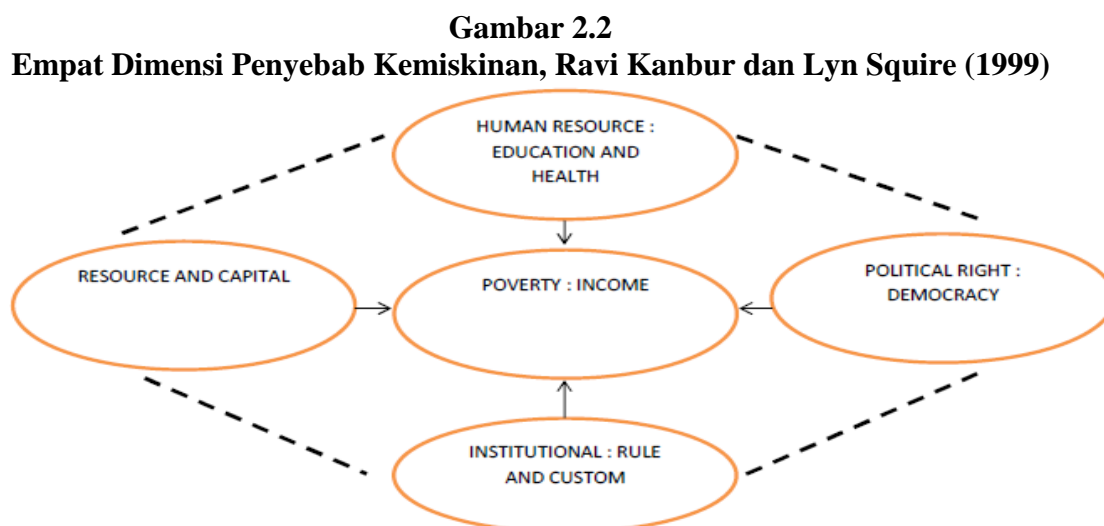
Gambar 2.1
Lingkaran Setan Kemiskinan Vesri Nurkse



Sumber : Mudrajad Kuncoro, 2006

Negara berkembang sampai kini masih saja memiliki ciri-ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan kapital dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan, dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal. Demikian seterusnya, berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Kuncoro, 2006).

Kanbur dan Squire (1999) dalam paper yang berjudul “The Evolution Of Thinking About Poverty: Exploring The Interactions”, menjelaskan kemiskinan dapat didekati dari 4 aspek yang digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999)

Teori yang dikemukakan oleh Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) bahwa ada empat dimensi yang mempengaruhi kemiskinan selain pendapatan. Pertama,

sumber daya dan modal. Kedua, Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang mempengaruhi kemiskinan adalah kondisi pendidikan dan kesehatan. Ketiga, sistem politik yang dimiliki suatu negara (demokrasi). Keempat, institusi berupa aturan dan adat yang ada di daerah tersebut.

Tulisan Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999), ini menyoroiti arti dan ukuran kemiskinan yang terus meluas, mulai dari daya beli barang (pendapatan) sampai dimensi standar hidup lainnya seperti umur, pendidikan dan kesehatan, serta mengenai risiko dan kerentanan, serta kelemahan dan tidak adanya hak bersuara. Makalah ini menyatakan bahwa meskipun ada korelasi antara dimensi yang berbeda, perluasan ini sangat mengubah pemikiran Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) tentang strategi untuk mengurangi kemiskinan. Arti yang lebih luas menjabarkan seperangkat kebijakan yang relevan dengan pengurangan kemiskinan. Namun perluasan ini juga menekankan bahwa strategi pengurangan kemiskinan harus mengenali interaksi antara kebijakan, yaitu dampak kombinasi yang dirancang secara tepat akan lebih besar daripada bagian-bagian yang terpisah.

Sumber daya dan modal menjadi dimensi pertama yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kemampuan permodalan individu akan menjadikan seorang dapat mampu berusaha untuk memperoleh penghasilan sehingga dapat memenuhi batas-batas kebutuhan hidup minimal mereka. Kemampuan permodalan akan memudahkan seseorang memiliki akses perekonomian yang lebih luas. Untuk itu bantuan penyediaan modal menjadi satu kebutuhan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan

sumber daya modal pada masyarakat yang selanjutnya dapat menurunkan angka kemiskinan.

Sumber daya manusia sebagai dimensi kedua yang secara umum terdiri dari tingkat pendidikan dan kesehatan. Tingkat pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang memiliki pengetahuan dan kemampuan analisis yang lebih baik. Pengetahuan akan dapat juga memberikan perubahan pada sikap dan perilaku seseorang ke arah lebih produktif dan mampu mengembangkan kemampuan mereka ke dalam praktik yang lebih baik sehingga pendidikan yang lebih tinggi akan mampu mengeluarkan seseorang dari kemiskinan. Aspek lain dari dimensi sumber daya manusia adalah kesehatan. Kesehatan dinilai sebagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan karena kesehatan berkaitan dengan awal dari kemampuan seseorang dalam melakukan berbagai hal. Seseorang yang berada dalam kondisi yang tidak sehat akan sulit melakukan beberapa hal termasuk hal-hal produktif. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat secara luas menjadi langkah untuk menurunkan kemiskinan.

Dimensi ketiga adalah sistem politik. Sistem politik umumnya berkaitan dengan kebebasan atau pemberian hak kepada warga negara untuk memiliki hak politik yang sama. Dimensi keempat adalah sistem institusi. Institusi umumnya berkaitan dengan adanya pelaksana atau pengatur batasan hak dan kewajiban dari setiap individu. Dimensi ketiga dan keempat tidak di analisis di dalam penelitian ini.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1992 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit kepada debitur dapat terlaksana apabila debitur memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu (Sanusi, 2011),

- a) *Character*, merupakan gambaran kepribadian dari calon debitur yang dilihat dari sifat, kebiasaan, cara hidup, keadaan latar belakang keluarga maupun hobinya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan janji yang telah ditetapkan.
- b) *Capacity*, merupakan penilaian calon debitur mengenai kemampuannya melunasi kewajiban pembayaran kredit, yang dapat diukur melalui pengalaman mengelola usaha serta sejarah perusahaan yang pernah dikelola.
- c) *Capital*, merupakan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola debitur, yang mana dapat dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan serta ratio keuntungan.
- d) *Condition of economy*, merupakan pertimbangan terhadap kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon usaha debitur, yang

mana erat kaitannya dengan faktor politik, peraturan perundang-undangan, serta keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

- e) *Collateral*, merupakan jaminan yang mungkin bisa disita apabila calon debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Adanya aturan bank yang mengharuskan nasabah menyerahkan agunan/jaminan kepada pihak bank, sangat memberatkan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin hanya memiliki aset yang terbatas. Sehingga menyebabkan sulitnya akses kredit untuk masyarakat miskin.

Menurut Firdaus (dalam Bayu Nuswantara, 2012), bahwa fungsi kredit pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan produksi, perdagangan dan konsumsi, sehingga pada akhirnya akan menaikkan pendapatan masyarakat.

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2006), terdapat beberapa jenis kredit atas dasar tujuan penggunaannya, antara lain :

1. Kredit Modal Kerja (KMK), merupakan kredit jangka pendek yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Ditinjau dari jangka waktunya, KMK terdiri atas 2 macam, yaitu :
 - a) *KMK-Revolving*, merupakan kredit yang dapat diperpanjang setiap periodenya tanpa harus mengajukan permohonan kredit baru.
 - b) *KMK-Einmaleg*, merupakan kredit yang hanya diberikan sebatas satu kali perputaran usaha nasabah, dan apabila pada periode selanjutnya nasabah menghendaki KMK berkelanjutan, maka nasabah harus mengajukan permohonan kredit baru.

2. Kredit Investasi (KI), merupakan kredit berjangka menengah atau panjang, yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang guna kegiatan usaha nasabah.
3. Kredit Konsumsi, merupakan kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.

2.1.2.2 Pengaruh Kredit terhadap kemiskinan

Kemiskinan berawal dari kurangnya modal yang dapat diakses untuk melakukan kegiatan usaha. Akibatnya produktivitasnya rendah dan berdampak pada rendahnya pendapatan. Selanjutnya berimplikasi pada ketidakmampuan menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Tabungan yang rendah menyebabkan investasi rendah dan akhirnya mengakibatkan kekurangan modal. Oleh karena itu langkah yang dapat diambil guna menanggulangi kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan pinjaman modal (Setiawan, 2011). Di dalam Todaro dan Smith (2006), salah satu strategi yang layak dipertimbangkan untuk memberantas kemiskinan adalah dengan membantu penduduk miskin dengan mengembangkan usaha mikro mereka, yang menjadi andalan penduduk miskin yang tidak bekerja di sektor pertanian. Telah diketahui bahwa pendanaan (pinjaman kredit) merupakan salah satu penghambat perkembangan usaha-usaha kecil ini. Dengan meningkatkan modal kerja dan aset-aset lain dalam usaha mikronya, kaum miskin dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatannya secara substansial. Hal serupa diungkapkan oleh Tambunan (2011) bahwa pembangunan pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan dapat didorong

melalui pemberian kredit mikro dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mempermudah proses produksi, penyediaan bahan baku dan *input-input* produksi lainnya dan pemasaran.

Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah akibat dari perbedaan terhadap akses permodalan (Arius Jonaidi, 2012). Penelitian Arius Jonaidi diperkuat hasil studi yang dilakukan oleh Sumartono (2002) dari SMERU Research Institute dan Strauss, et al. yang di sponsori oleh World Bank (Mudrajad Kuncoro, 2006) salah satu kesimpulan hasil penelitian ini adalah memberikan hak atas property dan memberikan akses terhadap kapital untuk golongan masyarakat miskin dapat merangsang pertumbuhan, dan mengurangi kemiskinan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Supriyanto (2006) pengentasan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik. Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja. Meskipun demikian kontribusinya terhadap PDB masih sekitar 30%. Upaya untuk memajukan sektor UKMK tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pengembangan UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

2.1.3 Pendidikan

2.1.3.1 Pengertian Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terdapat 3 jalur pendidikan yang diterapkan Indonesia, yaitu :

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. jenjang pendidikan formal:
 - a) Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
 - b) Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

- c) Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain.
 3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluargadan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan formal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan latihan tidak saja menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan ketrampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktifitas kerja (Payaman J. Simanjuntak, 1985)

Faktor-faktor penentu sisi permintaan dan sisi penawaran terhadap pendidikan (todaro dan smith, 2006):

1. Dari sisi permintaan ada dua hal yang paling berpengaruh terhadap jumlah atau tingkatan pendidikan yang diinginkan:
 - a) Harapan bagi seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik pada sektor modern di masa yang akan datang (hal ini merupakan manfaat pendidikan *individual/private benefits of education*) bagi siswa dan keluarganya.
 - b) Biaya-biaya pendidikan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang harus dikeluarkan atau tanggung oleh siswa atau keluarganya.
2. Pada sisi penawaran, jumlah sekolah di tingkat sekolah dasar, menengah, dan universitas lebih banyak ditentukan oleh proses politik, yang sering tidak ada kaitannya dengan kriteria ekonomi.

2.1.3.2 Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Ada dua alasan sistem pendidikan di negara berkembang tidak memperhatikan aspek pemerataan (*equality*) : (1) biaya-biaya untuk menempuh sekolah dasar relatif lebih tinggi untuk anak-anak miskin daripada orang kaya. (2) manfaat yang diharapkan dari pendidikan sekolah dasar bagi anak-anak miskin justru lebih rendah. Dengan demikian, adanya biaya yang lebih tinggi dan manfaat yang lebih rendah menunjukkan “tingkat pengembalian” (*rate of returns*) investasi pendidikan dari seorang anak dari keluarga miskin begitu terbatas, sehingga kemungkinan besar ia akan mengalami putus sekolah pada awal tahun

pendidikannya (Todaro dan Smith, 2006). Mankiew (2006) menyebutkan, seseorang yang berpendidikan tinggi dapat menghasilkan gagasan baru tentang bagaimana pilihan terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Jika gagasan ini dapat diterima oleh penduduk luas, maka semua orang dapat menggunakannya sehingga gagasan tersebut dapat dikatakan sebagai manfaat eksternal dari pendidikan. Dalam hal ini, tingkat pengembalian pendidikan yang diterima oleh penduduk lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengembalian yang diterima oleh individu. Hal serupa diungkapkan oleh Tambunan (2011), tidak diragukan lagi, pendidikan dan kesehatan yang baik bagi semua anggota masyarakat di suatu negara merupakan pra-kondisi bagi keberhasilan dari kebijakan anti-kemiskinan dari pemerintah negara tersebut.

Dicky Wahyudi dan Tri Wahyu Rejekingsih (2013) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang. variabel pendidikan signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini berarti setiap peningkatan pada variabel pendidikan, akan menyebabkan tingkat kemiskinan turun. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya juga menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui

pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

2.1.4 Kesehatan

2.1.4.1 Pengertian Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis

Menurut WHO (dalam todaro dan smith, 2006) sebuah lembaga penting PBB yang menangani masalah kesehatan global, mencantumkan definisi kesehatan pada halaman web-nya: adalah sebuah kondisi kesejahteraan fisik, mental, serta sosial, dan bukan sekedar bebas penyakit serta kelemahan fisik.

Pada tahun 2000, WHO menggunakan lima indikator kinerja untuk mengukur sistem kesehatan di 191 negara anggota WHO (todaro dan smith, 2006):

1. Tingkat kesehatan keseluruhan masyarakat.
2. Ketimpangan kesehatan dalam masyarakat.
3. Tingkat tanggapan sistem kesehatan (suatu kombinasi antara kepuasan pasien dan kinerja sistem kesehatan).
4. Distribusi tingkat tanggapan dalam populasi (seberapa baik masyarakat dari berbagai status ekonomi dilayani oleh sistem kesehatan).
5. Distribusi atau keadilan, beban finansial sistem kesehatan dalam masyarakat.

2.1.4.2 Pengaruh Kesehatan Terhadap Kemiskinan

Case and Fair (2007) menyatakan bahwa program nutrisi dan kesehatan bisa dipandang sebagai investasi modal sumber daya manusia yang membawa peningkatan produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi. Lincoln (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Todaro dan Smith (2006), mengemukakan 3 alasan penting peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan : (1) Kesehatan merupakan hal yang sentral dalam mengentaskan kemiskinan, karena masyarakat sering kali kurang mendapat informasi mengenai kesehatan akibat kemiskinan. (2) Rumah tangga mengeluarkan dana yang terlalu sedikit untuk kesehatan karena mereka mengabaikan eksternalitas (seperti masalah penularan penyakit). (3) Pasar akan berinvestasi terlalu sedikit pada infrastruktur kesehatan dan penelitian serta pengembangan, dan transfer teknologi ke negara-negara berkembang, karena kegagalan pasar.

Chriswardani Suryawati (2005) menyatakan bahwa dalam hal kesehatan, kemiskinan sangat berhubungan dengan tingginya angka kesakitan dan kematian. Tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan rendahnya kesempatan memperoleh berbagai fasilitas kesejahteraan sosial akan mempersulit terpenuhinya berbagai keperluan pangan bergizi atau kemampuan untuk menangkis penyakit, sehingga menyebabkan tingkat kematian bayi yang tinggi. Susi Lenggogeni dan Rita Yani Iyan (2012) di dalam penelitiannya bahwa penduduk miskin merupakan penduduk yang rentan dalam mendapatkan akses

terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Indikator yang dapat digunakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah dengan jalan melakukan intervensi dalam penurunan angka kematian bayi dan prevalensi balita kekurangan gizi dalam suatu wilayah. Kualitas kesehatan yang rendah, antara lain tercermin dari angka kematian bayi prevalensi balita kurang gizi.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Studi empiris mengenai kemiskinan, kredit usaha, pendidikan, kesehatan, dan telah banyak dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik tersebut.

1. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) dalam jurnal "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin", menggunakan metode estimasi ekonometrika data panel untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Data yang digunakan adalah data dari 26 provinsi tahun 1995 sampai dengan tahun 2005. Model penelitian ini: $Poverty = \beta_0 + \beta_1 PDRB + \beta_2 Populasi + \beta_3 Agrishare + \beta_4 Industrieshare + \beta_5 Inflasi + \beta_6 SMP + \beta_7 SMA + \beta_8 DIPLOMA + \beta_9 Dummy Krisis + \varepsilon$. Poverty = tingkat kemiskinan, PDRB = Produk Domestik Regional Bruto, Agrishare = pangsa sektor pertanian dalam PDRB, Industrieshare = pangsa sektor industri dalam PDRB, Inflasi = tingkat inflasi, SMP = jumlah lulusan setingkat SMP, SMA = jumlah lulusan setingkat SMA, DIPLOMA = jumlah lulusan setingkat Diploma, Dummy Krisis = dummy krisis ekonomi. Hasil dari penelitian ini adalah

variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin walaupun dengan pengaruh yang relative kecil. Variabel inflasi dan variabel populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel pangsa sektor pertanian dan pangsa sektor industri secara signifikan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel yang berpengaruh negatif paling besar dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin adalah pendidikan.

2. Arius Jonaidi (2012) dalam jurnal “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia”. Dalam penelitian ini menggunakan analisis ekonometrika. Dalam penelitian ini menggunakan Model Persamaan Simultan (*simultaneous Equations Models*) oleh karena variabel-variabel yang diteliti saling berkaitan satu sama lain. Ada dua pendekatan untuk mengestimasi parameter pada sistem persamaan simultan. Pertama, metode persamaan tunggal atau yang dikenal sebagai metode informasi terbatas (*Limited Information Methods*) contohnya kuadrat terkecil tak langsung (*Indirect Least Squares - ILS*), kuadrat terkecil duatahap (*Two-stage Least Squares - 2SLS*), dan *Limited Information Maximum Likelihood - LIML*. Kedua, metode sistem (*System Methods*) yang dikenal sebagai metode informasi penuh (*Full Information Methods*) contohnya kuadrat terkecil tiga-tahap (*Three-stage Least Squares - 3SLS*) dan *Full Information Maximum Likelihood - FIML* (Gujarati.D, 2002). Model penelitian ini: $Y1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 Y_2 + \varepsilon_1$, $Y2 = \beta_0 + \beta_1 X_2 + \beta_2 X_3 + \beta_3 X_4 + \beta_4 X_5 + \beta_5 Y1 + \varepsilon_2$.

X_1 = Pengangguran, X_2 = Investasi, X_3 = Harapan Hidup, X_4 = Melek Huruf, X_5 = Lama Pendidikan, Y_1 = Pertumbuhan Ekonomi, Y_2 = Kemiskinan, $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ = distorbansi. Hasil penelitian ini Terdapat hubungan dua arah yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan. Sebaliknya kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui peningkatan akses modal, kualitas pendidikan (peningkatan melek huruf dan lama pendidikan) dan derajat kesehatan (peningkatan harapan hidup) penduduk miskin diharapkan mampu meningkatkan produktivitas mereka dalam berusaha. Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3. Susi Lenggogeni dan Rita Yani Iyan (2012) dalam jurnal “Analisis Prioritas Penanggulangan Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”. Di dalam penelitian ini meliputi kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Riau dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS, dan lembaga/intansi lainnya. Dalam penelitian ini prioritas penanggulangan kemiskinan didasarkan pada empat aspek, pertama pendidikan melalui intervensi variabel angka putus sekolah penduduk usia 7-15 tahun, angka partisipasi murni SD, dan angka partisipasi murni SMP. Kedua kesehatan melalui intervensi variabel angka kematian bayi per 1.000 kematian hidup, dan prevalensi balita kekurangan gizi. Ketiga akses terhadap infrastruktur

melalui intervensi variabel akses terhadap air bersih, akses terhadap sanitasi, dan akses terhadap listrik. Keempat ketenagakerjaan melalui diintervensi variabel kesempatan kerja. Kesimpulan dari penelitian ini setiap daerah memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda, sehingga bentuk intervensi dalam penanggulangan kemiskinan tidak dapat digeneralisir tapi harus bersifat spesifik sesuai dengan isu strategis yang dihadapi masing-masing daerah.

4. Yufi Halimah Sa'diyah, Fitri Arianti (2012) dalam jurnal "Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Melalui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kecamatan Tugu Kota Semarang". Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil biasa. Model penelitian ini: $Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \mu$. Y = variabel kemiskinan, β_0 = bilangan konstanta, β_1 = koefisien regresi pendidikan, β_2 = koefisien regresi jumlah anggota keluarga, β_3 = koefisien regresi kepemilikan asset X_1 = pendidikan, X_2 = jumlah anggota keluarga, X_3 = Kepemilikan asset, μ = residu. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Dari tiga faktor yang diteliti (pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan kepemilikan asset), terbukti bahwa tingkat pendidikan dan kepemilikan asset berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan rumah tangga. Hal ini berarti tingkat pendidikan yang tinggi dan kepemilikan asset yang besar maka akan semakin besar pendapatan. Sedangkan jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan rumah tangga,

artinya semakin besar jumlah anggota keluarga, maka akan semakin kecil pendapatan keluarga. kepemilikan asset, μ = residu.

5. Dicky Wahyudi dan Tri Wahyu Rejekingsih (2013) dalam jurnal “analisis Kemiskinan di Jawa Tengah”. Penelitian ini menggunakan analisis data panel (pooled data) sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan software eviews 6. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara time-series data dan cross-section data (Gujarati, 2009). Data yang digunakan adalah data time series selama 4 tahun terakhir yakni tahun 2007-2010 dan data cross section sebanyak 35 data yang mewakili kabupaten / kota di Jawa Tengah. Hasil dari kombinasi data time series dan cross section menghasilkan 140 observasi. Model analisis penelitian ini:
$$K_{it} = \beta_0 + \beta_1 H_{it} + \beta_2 E_{it} + \beta_3 GE_{it} + \beta_4 G_{it} + \beta U_{it} + \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \alpha_3 D_3 + \alpha_4 D_4 + \alpha_5 D_5 + \alpha_6 D_6 + \alpha_7 D_7 + \alpha_8 D_8 + \alpha_9 D_9 + \alpha_{10} D_{10} + \alpha_{11} D_{11} + \alpha_{12} D_{12} + \alpha_{13} D_{13} + \alpha_{14} D_{14} + \alpha_{15} D_{15} + \alpha_{16} D_{16} + \alpha_{17} D_{17} + \alpha_{18} D_{18} + \alpha_{19} D_{19} + \alpha_{20} D_{20} + \alpha_{21} D_{21} + \alpha_{22} D_{22} + \alpha_{23} D_{23} + \alpha_{24} D_{24} + \alpha_{25} D_{25} + \alpha_{26} D_{26} + \alpha_{27} D_{27} + \alpha_{28} D_{28} + \alpha_{29} D_{29} + \alpha_{30} D_{30} + \alpha_{31} D_{31} + \alpha_{32} D_{32} + \alpha_{33} D_{33} + \alpha_{34} D_{34}$$

K = Tingkat kemiskinan per kabupaten / kota di Jawa Tengah, H = Kesehatan per kabupaten / kota di Jawa Tengah, E = Pendidikan per kabupaten / kota di Jawa Tengah, GE = Pengeluaran pemerintah per kabupaten / kota di Jawa Tengah, G = Pertumbuhan ekonomi per kabupaten / kota di Jawa Tengah, U = Pengangguran per kabupaten / kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini bahwa variabel kesehatan, pendidikan dan pengeluaran pemerintah signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat

kemiskinan di Jawa Tengah. Hal ini berarti setiap peningkatan pada variabel pendidikan, kesehatan dan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan tingkat kemiskinan turun. Sedangkan untuk variabel pengangguran signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, artinya ketika jumlah pengangguran meningkat maka tingkat kemiskinan akan juga meningkat. Namun untuk variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik mempengaruhi tingkat kemiskinan.

6. Inayah, et.al (2014), dalam jurnal “Pengaruh Kredit Modal Kerja Terhadap Pendapatan Bersih Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Sektor Formal” yang menggunakan desain penelitian kausal dan memasukkan variabel dependen yaitu jumlah kredit modal kerja dan variabel independen adalah pendapatan bersih. Hasil dalam penelitian ini adalah kredit modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bersih dan besar pengaruhnya sebesar 82,4 persen.

Selanjutnya ringkasan penelitian terdahulu dapat di lihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

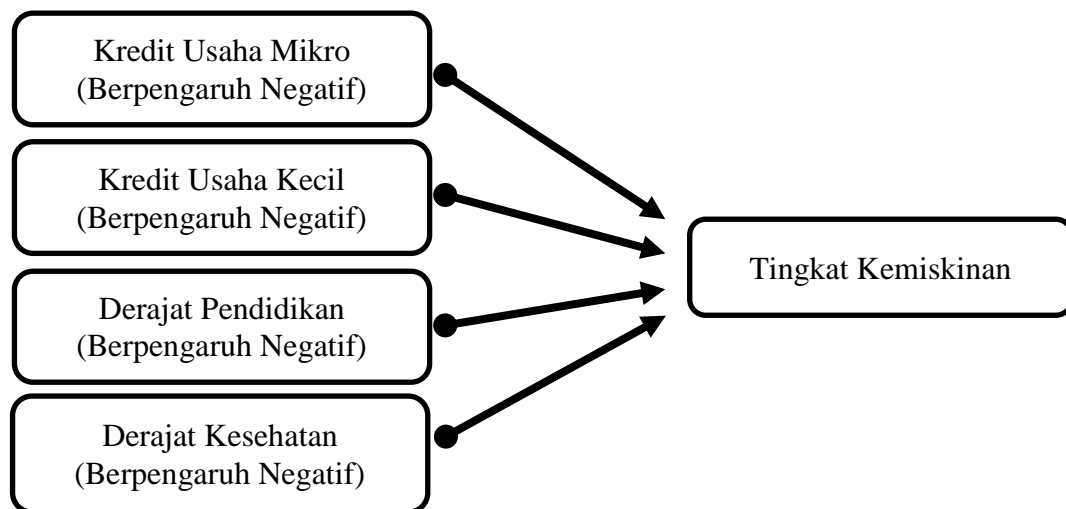
No.	Judul Penelitian	Variabel Dependen/Variabel Independen	Hasil Penelitian
1	”Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti	Variabel dependen : kemiskinan Variabel independen : PDRB, share sektor pertanian, share sektor industri, pendidikan.	Berdasarkan hasil penelitian seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan

	(2008)		
2	“Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia” Arius Jonaidi (2012)	Variabel dependen : Y_1 = Pertumbuhan Ekonomi, Y_2 = Kemiskinan Variabel independen : Pengangguran, Investasi, Harapan Hidup, Melek Huruf, Lama Pendidikan,	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam bentuk PMDN dan PMA berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
3	“Analisis Prioritas Penanggulangan Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”. Susi Lenggogeni dan Rita Yani Iyan (2012)	Penanggulangan kemiskinan didasarkan pada empat aspek, pertama pendidikan melalui intervensi variabel angka putus sekolah penduduk usia 7-15 tahun, angka partisipasi murni SD, dan angka partisipasi murni SMP. Kedua kesehatan melalui intervensi variabel angka kematian bayi per 1.000 kematian hidup, dan prevalensi balita kekurangan gizi. Ketiga akses terhadap infrastruktur melalui intervensi variabel akses terhadap air bersih, akses terhadap sanitasi, dan akses terhadap listrik. Keempat ketenagakerjaan melalui diintervensi variabel kesempatan kerja.	penelitian ini setiap daerah memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda, sehingga bentuk intervensi dalam penanggulangan kemiskinan tidak dapat digeneralisir tapi harus bersifat spesifik sesuai dengan isu strategis yang dihadapi masing-masing daerah.
4	“Analisis	Variabel dependen =	Hasil penelitian ini tingkat

	Kemiskinan Rumah Tangga Melalui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kecamatan Tugu Kota Semarang” Yufi Halimah Sa’diyah, Fitri Arianti (2012)	kemiskinan Variabel independen = pendidikan, jumlah anggota keluarga, Kepemilikan asset.	pendidikan dan kepemilikan asset berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan rumah tangga. Sedangkan jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan rumah tangga.
5	“analisis Kemiskinan di Jawa Tengah” Dicky Wahyudi dan Tri Wahyu Rejekingsih (2013)	Variabel dependen = Tingkat kemiskinan Variabel independen = Kesehatan, Pendidikan, Pengeluaran pemerintah, Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran.	Hasil penelitian ini tingkat pendidikan dan kepemilikan asset berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan rumah tangga. Sedangkan jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan rumah tangga.
6	“Pengaruh Kredit Modal Kerja Terhadap Pendapatan Bersih Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Sektor Formal” Iayah, dkk (2014),	variabel dependen = jumlah kredit modal kerja variabel independen = pendapatan bersih	Hasil dalam penelitian ini adalah kredit modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bersih dan besar pengaruhnya sebesar 82,4 persen.

2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan tinjauan pustaka serta penelitian-penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tingkat kredit usaha, derajat pendidikan, derajat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.3**Kerangka Pemikiran**

Pemberian pinjaman kredit usaha merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Pemberdayaan Usaha Skala Mikro dan Kecil bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala mikro dan kecil terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap. Diutarakan Yunus (dalam Todaro, 2006) yang mengatakan bahwa lemahnya akses untuk mendapatkan kredit bagi sebagian masyarakat miskin adalah salah satu penghambat utama kemajuan ekonomi mereka.

Pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan memperbesar peluang kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan memperoleh kemakmuran. Rasidin (2010), menyatakan melalui investasi tingkat pendidikan

yang tinggi, mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dari tingkat produktivitas yang tinggi, dan pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan yang lebih baik.

Tingkat kemiskinan memiliki hubungan dengan tingginya angka kesakitan dan kematian. Tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan rendahnya kesempatan memperoleh berbagai fasilitas kesejahteraan sosial akan mempersulit terpenuhinya berbagai keperluan pangan bergizi atau kemampuan untuk menangkis penyakit. Dengan mengatasi tingkat kematian diharapkan kemiskinan juga akan semakin menurun. Di dalam Todaro dan Smith (2006), kondisi kesehatan yang buruk di negara-negara berkembang berakibat negatif terhadap produktivitas orang dewasa, yang ditunjukkan bahwa orang-orang yang sehat menerima upah yang lebih tinggi

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga variabel kredit usaha mikro berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

2. Diduga variabel kredit usaha kecil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
3. Diduga variabel derajat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
4. Diduga variabel derajat kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan periode waktu tahun 2008 – 2012. Variabel independent dalam penelitian ini adalah kredit usaha mikro, kredit usaha kecil, derajat pendidikan, dan derajat kesehatan di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan periode waktu tahun 2008 – 2012.

Berikut definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. **Tingkat Kemiskinan (K)**

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Data kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tingkat kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2008 – 2012. Dalam penelitian ini data yang digunakan dalam satuan persen. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik dalam buku "Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2008 – 2012".

2. Kredit Usaha Mikro (KU1)

Kredit usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Ukuran yang dipakai adalah persentase posisi kredit usaha mikro terhadap total kredit menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah dari tahun 2008 – 2012. Data bersumber dari Bank Indonesia dalam buku "Statistik Keuangan Ekonomi Daerah Jawa Tengah". Persentase kredit mikro yang diberikan oleh bank umum kab/kota di Jawa Tengah (%) di hitung dari $(Kredit\ mikro/total\ kredit) \times 100\%$

3. Kredit Usaha Kecil (KU2)

Kredit usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Ukuran yang dipakai adalah persentase posisi kredit usaha kecil terhadap total kredit menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah dari tahun 2008 – 2012. Data bersumber dari Bank Indonesia dalam buku "Statistik Keuangan Ekonomi Daerah Jawa Tengah". Persentase kredit kecil yang diberikan oleh bank umum kab/kota di Jawa Tengah (%) di hitung dari $(Kredit\ kecil/total\ kredit) \times 100\%$

4. Derajat Pendidikan (PD)

Variabel derajat pendidikan dalam penelitian ini adalah persentase tamatan pendidikan 10 tahun keatas dari masing – masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008 – 2012. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik dalam buku ”Statistik Sosial dan kependudukan Jawa Tengah Hasil Susenas”.

Variabel derajat pendidikan di hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$PDDKN = \sum (b_{ikt} \times P_{ikt}) \dots \dots \dots (3.1)$$

PDDKN = skor tingkat pendidikan

b = bobot strata pendidikan (%)

P = proporsi jumlah tamatan strata pendidikan (%)

k = Kab/Kota Jawa Tengah

t = tahun tertentu

strata pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (X)	Bobot(b_{kt})	Skor Pendidikan
		$b_{kt} = X/21 \times 100$	$PDDKN = b_{kt} \times P_{ikt}$
SD<	3	$3/21 \times 100 = 14.29$	$*14.29 \times P_{ikt}$
SD	6	$6/21 \times 100 = 28.57$	$28.57 \times P_{ikt}$
SMP	9	$9/21 \times 100 = 42.86$	$42.86 \times P_{ikt}$
SMA	12	$12/21 \times 100 = 57.14$	$*57.14 \times P_{ikt}$
DI	13	$*13/21 \times 100 = 61.90$	$*61.90 \times P_{ikt}$
DII	14		
DIII	15	$15/21 \times 100 = 71.43$	$71.43 \times P_{ikt}$
S1	16	$*16/21 \times 100 = 76.19$	$*76.19 \times P_{ikt}$
S2	18		
S3	21		
TOTAL	21	-	$\sum (b_{kt} \times P_{ikt})$

- ❖ Sesuai dengan data sekunder “persentase tamatan pendidikan 10 tahun ke atas“ data tamatan pendidikan DI, DII di gabung (DI/DII) dan data

tamatan pendidikan S1,S2,S3 di gabung (DIV/S1 dan S2/S3). DI,DII di beri rata-rata lama sekolah sebesar 13 tahun karena dianggap tamatan pendidikan DI lebih banyak dan S1,S2,S3 di beri rata-rata lama sekolah sebesar 16 tahun karena dianggap tamatan pendidikan S1 lebih banyak.

$P_{ikt}(SD<)$ = jumlah persentase tdk/blm pernah sekolah + tdk/blm tamat SD/MI

$P_{ikt}(SMA)$ = jumlah persentase tamatan SMA + jumlah persentase tamatan SMK.

$P_{ikt}(DI-DII)$ = jumlah tamatan DI/DII.

$P_{ikt}(S1-S3)$ = jumlah tamatan DIV/S1 dan S2/S3.

5. Derajat kesehatan (KS)

Variabel derajat kesehatan dalam penelitian ini adalah angka kematian bayi dengan periode tahun 2008-2012. Angka kematian bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik dalam buku "Profil Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah". Angka kematian bayi dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{angka kematian bayi} = \frac{\text{jumlah kematian bayi pada tahun tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu}} \times k$$

k = bilangan konstan = 1000

3.2 Jenis dan Sumber Data

Untuk mencapai tujuan penelitian dalam menganalisis kemiskinan, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif terdiri dari data

tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, data kredit usaha mikro dan kecil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, data persentase tamatan pendidikan 10 tahun ke atas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dan data angka kematian bayi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Data yang digunakan sebagai latar belakang berupa tahun periode 2008 – 2012. Sedangkan data yang digunakan sebagai observasi adalah data deret waktu (*time-series data*) untuk kurun waktu tahun serta data antar ruang (*cross section*) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah dan menghasilkan 175 observasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti buku-buku literatur, catatan-catatan atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang diambil adalah data seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 29 Kabupaten dan 6 Kota. Tahun yang dipilih adalah tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya melalui data sekunder. Data yang diperoleh merupakan data-data dari literatur yang berkaitan baik berupa, dokumen, artikel, catatan-catatan, maupun arsip. Data yang diperoleh kemudian disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan dan tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan BI Wilayah V Jawa

Tengah. Meliputi data tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, data kredit usaha mikro dan kecil Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, data persentase tamatan pendidikan 10 tahun ke atas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dan data angka kematian bayi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Data tersebut dari periode 2008 sampai tahun 2012.

3.4 Metode Analisis

Studi ini menggunakan analisis panel data (*pooling data*) sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program *evIEWS 6*. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu *time series* dan deret lintang *cross section* (Gujarati,2010). Model data cross section sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i;$$

$$i = 1, 2, \dots, N \dots \dots \dots (3.2)$$

Dimana N adalah banyaknya data *cross section*.

Sedangkan model persamaan dengan *time series* adalah :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \mu_t;$$

$$t = 1, 2, \dots, T \dots \dots \dots (3.3)$$

Di mana T adalah banyaknya data *time-series*

Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.4)$$

$$i = 1, 2, 3, \dots, N ; \text{ dan } t = 1, 2, 3 \dots T$$

Dimana :

N = Banyaknya observasi

T = Banyaknya waktu

N x T = Banyaknya data panel

Menurut Baltagi dalam Gujarati (2010), manfaat data panel dibandingkan dengan time series dan cross section :

1. Estimasi teknik data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap individu.
2. Dengan menggabungkan data time series dan data cross section maka data panel memberikan data lebih informatif, lebih bervariasi, rendah tingkat kolonieritas antar variabel, lebih besar degree of freedom dan lebih efisien.
3. Data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis.
4. Data panel mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi melalui data murni time series atau data murni cross section.
5. Data panel memungkinkan untuk mempelajari model perilaku yang lebih kompleks.
6. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu atau perusahaan karena unit data lebih banyak

Dalam analisis model data panel, dikenal dua macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Kedua pendekatan yang dilakukan dalam analisis data panel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit (*cross section*) maupun antar waktu (*time – series*). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) *Least Square Dummy Variable* (LSDV) Menurut Gujarati (2010) dalam data panel fixed effect model terdapat beberapa asumsi yang mungkin digunakan dan berkaitan yang dapat dibuat terhadap intercept, koefisien slope, dan error term. Beberapa kemungkinan tersebut antara lain :

- a) Intercept dan koefisien slope konstan sepanjang waktu dan ruang. Sedangkan error term mencerminkan perbedaan sepanjang waktu dan individu.
- b) Koefisien slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu.
- c) Koefisien slope konstan, tetapi intercept bervariasi untuk setiap individu dan waktu.
- d) Semua koefisien (baik intercept maupun koefisien slope) bervariasi untuk setiap individu.
- e) Intercept dan koefisien slope bervariasi untuk setiap individu dan waktu.

2. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*)

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (fixed

effect) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (trade off). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model panel data yang didalamnya melibatkan korelasi antar error term karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat di atasi dengan pendekatan model komponen error (error component model) atau disebut juga model acak (random effect).

Menurut Judge dalam Gujarati (2010) terdapat empat pertimbangan pokok untuk memilih antara menggunakan pendekatan efek tetap (fixed effect) dan pendekatan efek acak (random effect) dalam data panel :

- a) Apabila jumlah time-series (T) besar sedangkan jumlah cross-section (N) kecil, maka hasil fixed effect dan random effect tidak jauh berbeda sehingga dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung yaitu fixed effect model (FEM).
- b) Apabila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit cross-section yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (random) maka random effect harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit cross-section yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan fixed effect.
- c) Apabila komponen error ε_i individual berkorelasi maka penaksir random effect akan bias dan penaksir fixed effect tidak bias.

- d) Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari random effect dapat terpenuhi, maka random effect lebih efisien dibandingkan fixed effect.

3.4.1 Estimasi Model Regresi Dengan Panel Data

Penelitian ini mengestimasi pengaruh kredit usaha mikro (KU1), kredit usaha kecil (KU2) derajat pendidikan (PD), derajat kesehatan (KS), terhadap tingkat kemiskinan (K) di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data time series selama 5 tahun terakhir yakni tahun 2008 – 2012 dan data cross section sebanyak 35 data yang mewakili kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil dari kombinasi data time series dan cross section menghasilkan 175 observasi. Fungsi persamaan model regresi data panel tersebut dapat dituliskan sebagai berikut :

$$K_{it} = \beta_0 + \beta_1 KU1_{it} + \beta_2 KU2_{it} + \beta_3 PD_{it} + \beta_4 KS_{it} \dots \dots \dots (3.5)$$

K = Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah tahun 2008 – 2012

KU1 = Persentase Kredit Usaha Mikro Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

KU2 = Persentase Kredit Usaha Kecil Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

PD = Skor Pendidikan Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

KS = Angka Kematian Bayi Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

β_0 = intercept

$\beta_1 - \beta_5$ = koefisien regresi variabel independent

μ_{it} = Error Term

i = cross-section

t = time series

3.4.2 Estimasi Model Regresi Dengan Penggunaan Variabel Dummy

Penelitian ini menggunakan asumsi Fixed Effect Model (FEM) sebagaimana pertimbangan pokok yang disampaikan oleh Judge bahwa unit cross section pada penelitian ini tidak diambil berdasarkan acak dan jumlah observasi yang dilakukan hanya 175 observasi. Sedangkan untuk Random Effect Model lebih sering digunakan untuk jumlah observasi yang banyak (diatas 1000 observasi). Asumsi dalam FEM yang digunakan dalam penelitian ini adalah asumsi koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu. Dalam artian intersep dari setiap individu diasumsikan memiliki perbedaan yang dikarenakan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam hal ini kabupaten/kota. Untuk melakukan asumsi tersebut diperlukan variabel dummy untuk memberikan nilai perbedaan pada masing-masing kabupaten/kota. Oleh sebab itu asumsi model FEM ini sering disebut sebagai Least Square Dummy Variabel (LSDV).

Dummy yang digunakan dalam penelitian ini adalah dummy wilayah (kabupaten/ kota). Dari hasil tersebut nantinya akan diketahui perbedaan perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 5 tahun periode penelitian (2008 – 2012). Penggunaan dummy variabel membutuhkan

benchmark / wilayah acuan. Benchmark yang dipilih adalah kota Semarang. Alasan pemilihan kota Semarang sebagai benchmark karena kota Semarang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten/kota terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. Model persamaan dengan LSDV sebagai berikut :

$$\mathbf{K}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \mathbf{KU1}_{it} + \beta_2 \mathbf{KU2}_{it} + \beta_3 \mathbf{PD}_{it} + \beta_4 \mathbf{KS}_{it} + \sum_{i=1}^{34} \alpha_i \mathbf{D}_i + \mu_{it}$$

.....(3.6)

Dimana :

K = Persentase Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah tahun
2008 – 2012

KU1 = Persentase Kredit Usaha Mikro Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun
2008 – 2012

KU2 = Persentase Kredit Usaha Kecil Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun
2008 – 2012

PD = Skor Pendidikan Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

KS = Angka Kematian Bayi Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008 –
2012

D₁ = Dummy Kabupaten Cilacap

D₂ = Dummy Kabupaten Banyumas

D₃ = Dummy Kabupaten Purbalingga

D₄ = Dummy Kabupaten Banjarnegara

D₅ = Dummy Kabupaten Sragen

D₆ = Dummy Kabupaten Purworejo

- D₇ = Dummy Kabupaten Wonosobo
- D₈ = Dummy Kabupaten Magelang
- D₉ = Dummy Kabupaten Boyolali
- D₁₀ = Dummy Kabupaten Kebumen
- D₁₁ = Dummy Kabupaten Sukoharjo
- D₁₂ = Dummy Kabupaten Wonogiri
- D₁₃ = Dummy Kabupaten Karanganyar
- D₁₄ = Dummy Kabupaten Kudus
- D₁₅ = Dummy Kabupaten Grobogan
- D₁₆ = Dummy Kabupaten Blora
- D₁₇ = Dummy Kabupaten Temanggung
- D₁₈ = Dummy Kabupaten Pati
- D₁₉ = Dummy Kabupaten Klaten
- D₂₀ = Dummy Kabupaten Pemalang
- D₂₁ = Dummy Kabupaten Demak
- D₂₂ = Dummy Kabupaten Semarang
- D₂₃ = Dummy Kabupaten Rembang
- D₂₄ = Dummy Kabupaten Jepara
- D₂₅ = Dummy Kabupaten Tegal
- D₂₆ = Dummy Kabupaten Batang
- D₂₇ = Dummy Kabupaten Pekalongan
- D₂₈ = Dummy Kabupaten Brebes
- D₂₉ = Dummy Kabupaten Kendal

D_{30} = Dummy Kota Salatiga

D_{31} = Dummy Kota Magelang

D_{32} = Dummy Kota Surakarta

D_{33} = Dummy Kota Pekalongan

D_{34} = Dummy Kota Tegal

β_0 = Intercept

$\beta_0 - \beta_4$ = Koefisien regresi variabel independen

$\alpha_1 - \alpha_{34}$ = Koefisien dummy wilayah

μ_{it} = error term

i = cross section

t = time series

3.5 Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik

Pengujian dengan asumsi klasik dilakukan untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut harus terbebas dari adanya penyakit-penyakit seperti: normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan data haruslah terdistribusi secara normal. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasi adalah sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2009) deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal.

Dalam penelitian ini guna mendeteksi apakah data terdistribusi secara normal atau tidak, maka dilakukan dengan cara melakukan uji *Jarque-Bera*, yaitu membandingkan nilai *Jarque-Bera* yang diperoleh dengan nilai χ^2 (*Chi-square*) tabel. Apabila nilai *Jarque-Bera* lebih kecil dibanding nilai χ^2 (*Chi-square*) tabel, maka model kemiskinan terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2009), deteksi multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik dicerminkan dengan tidak adanya korelasi antara variabel bebas, namun apabila terindikasi adanya korelasi, maka variabel tersebut ortogonal, maksudnya variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.

Penelitian ini dalam mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas, dilakukan dengan cara menganalisis menggunakan matrik korelasi tiap variabel bebas. Apabila ditemukan korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90) maka model kemiskinan terkena penyakit multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2009), Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t - 1$ (sebelumnya), dimana jika terjadi korelasi dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series). Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi adalah dengan uji Breusch-Godfrey (BG Test).

Dalam penelitian ini guna mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi, maka dilakukan dengan cara melakukan uji *Breusch-Godfrey*, yaitu membandingkan nilai *Obs*R-squared* hasil uji *Breusch-Godfrey* dengan nilai χ^2 (*Chi-square*) tabel. Apabila nilai *Obs*R-squared* hasil uji *Breusch-Godfrey* lebih kecil dibanding nilai χ^2 (*Chi-square*) tabel, maka model kemiskinan terbebas dari penyakit autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2009) deteksi heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini guna mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, maka dilakukan dengan cara melakukan uji *White*, yaitu membandingkan nilai *Obs*R-squared* hasil uji *White* dengan nilai χ^2 (*Chi-square*) tabel. Apabila nilai *Obs*R-squared* hasil uji *White* lebih kecil dibanding nilai χ^2 (*Chi-square*) tabel, maka model kemiskinan terbebas dari penyakit heteroskedastisitas.

3.6 Pengujian Statistik

1. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Bertujuan mengukur kebaikan suatu model (goodness of fit) digunakanlah koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka / nilai yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel dependen (Y) yang mampu dijelaskan oleh variabel independen (X) (Gujarati, 2010). Nilai R^2 berkisar antara nol dan satu ($0 < R^2$). Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati nilai satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, dan model tersebut dapat dikatakan baik (Gujarati, 2010).

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian yang dilakukan guna mengetahui pengaruh secara bersama-sama semua variabel independen yang terdapat pada model terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

$H_0: \beta_0 = \beta_0 = \beta_0 = \beta_0 = \beta_0 = 0$, tidak ada pengaruh dari semua variable independen terhadap variabel dependen Secara bersama-sama

$H_0: \beta_0 \neq \beta_0 \neq \beta_0 \neq \beta_0 \neq \beta_0 \neq 0$, terdapat pengaruh dari semua variabel Independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel, dimana nilai F hitung dapat dipenuhi dengan formula sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)} \dots \dots \dots (3.7)$$

dimana :

R^2 : koefisien determinasi

k : jumlah variabel independen termasuk konstanta

n : jumlah sampel

Apabila nilai F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_1 . Artinya ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dan sebaliknya bila, F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak (Ghozali, 2009).

3. Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Guna menguji adanya pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

a) Uji t untuk variabel Kredit Usaha Mikro

H_0 : $\beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh antara persentase kredit usaha mikro dengan tingkat kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah).

H_1 : $\beta_1 < 0$ (ada pengaruh negatif antara persentase kredit usaha mikro dengan tingkat kemiskinan dengan Tingkat Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah).

Bila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

b) Uji t untuk variabel Kredit Usaha Kecil

H_0 : $\beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh antara persentase kredit usaha kecil dengan tingkat kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah).

$H_1 : \beta_1 < 0$ (ada pengaruh negatif antara persentase kredit usaha kecil dengan tingkat kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah).

Bila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

c) Uji t untuk variabel Derajat Pendidikan

$H_0 : \beta_2 = 0$ (tidak ada pengaruh antara skor pendidikan dengan tingkat kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah).

$H_1 : \beta_2 < 0$ (ada pengaruh negatif antara skor pendidikan dengan tingkat kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah).

Bila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

d) Uji t untuk variabel Derajat Kesehatan

$H_0 : \beta_3 = 0$ (tidak ada pengaruh antara angka kematian bayi dengan tingkat kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah).

$H_1 : \beta_3 > 0$ (ada pengaruh positif antara angka kematian bayi dengan tingkat kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah).

Bila t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Jika t -hitung $>$ t -tabel maka H_0 ditolak, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

b) Jika t -hitung $<$ t -tabel maka H_0 tidak ditolak, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik t , dimana nilai t hitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut :

$$t = \frac{b_j}{se(b_j)} \dots \dots \dots (3.8)$$

Dimana :

b_j = koefisien regresi

$se(b_j)$ = *standar error*

Koefisien regresi Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel. Apabila t-hitung > t-tabel, maka hipotesis alternative diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila t-hitung < t-tabel maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.